

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

SINERGITAS PEMPROV DKI JAKARTA DAN SATKOWIL DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL MENJELANG MASA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Mohamad Slamet¹

Dadan Kurnia²

Dahly Sukmapryandhika³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : mohamadslamet11@gmail.com

Abstrak

Tesis ini membahas sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satkowil dalam mencegah konflik sosial menjelang pemilihan umum serentak 2024 di wilayah DKI Jakarta. Sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Koordinasi Wilayah (Satkowil) dalam Mencegah Konflik Sosial menjelang Pemilu Serentak 2024 di Wilayah DKI Jakarta. Pemilihan umum serentak pada tahun 2024 di wilayah DKI Jakarta adalah momen penting bagi masyarakat Jakarta untuk menentukan pemimpin mereka selama masa jabatan berikutnya. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satkowil dalam mencegah konflik sosial menjelang pemilihan umum serentak 2024 di wilayah DKI Jakarta masih belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 1. Masih adanya miskomunikasi selama pelaksanaan kegiatan pencegahan konflik sosial. dan 2. Masih ada ego sektoral antar lembaga dalam pelaksanaan di lapangan, ini menunjukkan bahwa koordinasi belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satkowil perlu melakukan beberapa upaya, seperti: a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satkowil perlu meningkatkan komunikasi yang terbuka dan jujur. b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satkowil perlu bekerja sama dan saling mendukung dalam upaya mencegah konflik sosial. c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satkowil perlu membangun kepercayaan antara semua pihak dengan memberikan contoh kepemimpinan yang baik dan konsisten. d. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satkowil perlu menunjukkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: Sinergi, Pemerintah Daerah, Satkowil, Konflik Sosial, Pemilihan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Abstract

This thesis discusses the synergy between the DKI Jakarta Provincial Government and Satkowil in preventing social conflict ahead of the 2024 simultaneous elections in the DKI Jakarta area. Synergy between the DKI Jakarta Provincial Government and the Regional Coordination Unit (Satkowil) in Preventing Social Conflict Ahead of the 2024 Simultaneous Elections in the DKI Jakarta Region. The simultaneous general election in 2024 in the DKI Jakarta region is an important moment for the people of Jakarta to determine their leaders during the next term of office. The results of researchers in the field are that the synergy between the DKI Jakarta Provincial Government and Satkowil in preventing social conflict ahead of the 2024 simultaneous elections in the DKI Jakarta area is still not running optimally, this is due to several factors such as: 1. There is still miscommunication during the implementation of social conflict prevention activities. and 2. There is still sectoral ego between agencies in implementation in the field, this shows that coordination is not optimal. To overcome this problem, the DKI Jakarta Provincial Government and Satkowil need to make several efforts, such as: a. The DKI Jakarta Provincial Government and Satkowil need to improve open and honest communication. b. The DKI Jakarta Provincial Government and Satkowil need to cooperate and support each other in efforts to prevent social conflict. c. The DKI Jakarta Provincial Government and Satkowil need to build trust between all parties by providing examples of good and consistent leadership. d. The DKI Jakarta Provincial Government and Satkowil need to show transparency in decision making and implementation of activities.

Keywords: *Synergy, Regional Government, Satkowil, Social Conflict, Election*

PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar". Sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan Pemilu, merupakan instrumen yang harus ada dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Karena Pemilu itu merupakan salah satu aktualisasi dari Kedaulatan Rakyat. Oleh sebab itu, aktualisasi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini harus dijalankan menurut UUD 1945. Ini sesuai dengan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pandangan, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, atau Indonesia adalah negara demokrasi yang kostitusi . Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sesuai dengan keberadaan kultur masyarakat Indonesia yang majemuk, tentunya pelaksana penegakan kedaulatan rakyat dalam Hak Asasi Manusia itu harus sesuai dengan Demokrasi Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

Pemilihan umum sebagai kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang bertujuan sebagai wujud kedaulatan rakyat demi menghasilkan pemerintahan Negara yang hakiki dan demokratis berdasarkan UUD 1945 dan pancasila. Perkembangan dalam penentuan siapa yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap Negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi politik masyarakat apakah melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan.

Setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu, namun tidak bagi yang merupakan alat Negara dan alat pertahanan Negara seperti Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Bahwa TNI merupakan alat Negara dan alat pertahanan yang senantiasa harus berada diatas kepentingan bangsa sehingga para personel TNI tidak perlu diberi hak memilih dan dipilih pada Pemilu untuk menjaga netralitas.

Berdasarkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yang

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

menempatkan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung, dimana setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah teritorial daratan, lautan dan wilayah udara, secara geografis berada pada posisi silang antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Karena letaknya yang sangat strategis baik dalam hubungan global maupun regional tentunya memiliki keuntungan dan kerawanan ditinjau dari berbagai kepentingan. Kerawanan yang mungkin dihadapi dapat berupa ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang perlu diatasi melalui pola *Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP)*.

Kontestasi lima tahunan untuk mencari calon pemimpin ideal, kerap masih terantuk kerikil dan batu. Berbagai pelanggaran dalam masa Pemilu maupun Pilkada, masih terus menjadi warna yang lengket. Tak terkecuali di DKI Jakarta yang bersiap menggelar Pemilu serentak 2024 dan kini sudah mulai terlihat memanas suhunya, terlebih adanya pengalaman pelaksanaan Pilkada pada tahun 2017 yang menimbulkan konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Ketegangan akibat polarisasi politik yang terjadi kemudian membuat fenomena identitas sosial di masyarakat terbentuk. Berawal dari proses kategorisasi sosial hingga bentuk *in group out group*. Akhirnya terjadi komparasi antar kelompok yang membuat persepsi. Hal ini dijumpai pada kasus penolakan menyolatkan mayat pendukung Basuki yang meninggal. Demonstrasi berskala besar dan membawa identitas agama seperti 411 dan 212 pun menjadi trigger bagi ketegangan yang ada. Akan tetapi, pada pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pilkada DKI Tahun 2017 tidak terjadi eskalasi konflik yang meningkat hingga konflik kekerasan, bahkan cenderung proses de-escalasi. Sehingga Pilgub DKI Jakarta dapat dilalui dengan aman dan damai, sejak pemungutan suara sampai penentuan pemenang Pilgub DKI Jakarta. Hal ini terjadi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

salah satunya adalah peran aktif pemerintah daerah dengan seluruh pihak khususnya Stakowil yang terkait dalam melakukan upaya pencegahan konflik pada pilkada DKI Tahun 2017. Terbukti, pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui badan kesatuan bangsa dan politik serta Satkowil bertanggung jawab melakukan penanganan konflik sosial di DKI Jakarta termasuk di dalamnya permasalahan konflik yang terjadi pada pilgub DKI Jakarta.

Agar penyelenggaraan pemilu serentak 2024 berlangsung dengan sukses, tentu harus dibarengi dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. Disinilah peran penting Pemerintah Daerah dan Aparat Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) sebagai pengembang fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai penjaga kedaulatan NKRI dan pelayan masyarakat, untuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan damai dan tertib Metode Penelitian.

Metode penelitian deskriptif merupakan salah satu cara guna mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau suatu cara dalam meneliti permasalahan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan fenomena pada masa sekarang yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, agar dapat menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan. Keadaan dan kondisi yang didapatkan dari sekelompok manusia yang diamati, gambar atau foto, dokumen resmi serta catatan wawancara. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui dan memahami sinergitas Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil dalam mencegah konflik sosial menjelang pemilu serentak 2024 di wilayah DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) yang menyatakan bahwa Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Moleong (2010:6) menyimpulkan bahwa: Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu komplek khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan agar dapat menafsirkan fenomena sosial yang terjadi sehingga dapat mendeskripsikannya dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diamati oleh peneliti.

KERANGKA TEORI

Tinjauan Teoritis

Teori menurut Covey, menjelaskan bahwa sinergitas bisa dibangun dari cara berkomunikasi serta koordinasi.

- ❖ Komunikasi, Komunikasi ialah sebuah tindakan penjelasan informasi antar pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang yang dilakukan untuk menginterpretasikan sebuah pandangan baru.
Komunikasi bisa dijabarkan menjadi dua bagian, yaitu:
 - Komunikasi berorientasi yang dilakukan terhadap seseorang/organisasi yang akan melaksanakan kegiatannya.
 - Komunikasi berorientasi pada penerima yang menangani semua aktivitas dalam kerangka komunikasi yang melibatkan antar perorangan.
- ❖ Koordinasi. Adanya sinergi dari instansi pastilah terdapat adanya koordinasi antar instansi. Koordinasi dapat diartikan sebagai sebuah integrasi dari aktivitas individu maupun kelompok menuju ke arah tujuan bersama. terdapat 5 syarat agar terwujudnya yang kompak yaitu:
 - Hubungan langsung, bahwasanya hubungan langsung dari koordinasi yang dilakukan antar instansi.
 - Kesempatan awal, sebelum ke tahap perencanaan pastilah diperlukan dengan adanya kesempatan awal untuk saling koordinasi.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

- Kontinuitas, proses yang dilakukan secara di setiap waktu pada saat tahap perencanaan.
- Dinamisme, koordinasi dapat dilakukan secara terus-menerus yang dapat dijadikan sebagai perubahan dari lingkungan intern maupun ekstern.
- Tujuan yang jelas, tujuan jelas merupakan bagian penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut sinergitas dapat dibangun melalui komunikasi dan koordinasi. Kedua kegiatan inilah yang menjadi model sinergi yang akan digunakan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Forkopimda DKI Jakarta dalam mencegah konflik sosial di masa pemilu **Kerangka Berfikir** Dari uraian teoritis di atas, alur kerangka berfikir gambarkan sebagai berikut :

Gambar Kerangka Berfikir

Sinergitas Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil dalam mencegah konflik sosial menjelang pemilu serentak 2024 di wilayah DKI Jakarta



Grand Teori Sinergitas menurut Corvey :

1. Komunikasi.
2. Koordinasi



. Fenomena Permasalahan yang muncul :

1. Masih adanya misskomunikasi pada saat pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan konflik sosial.
2. Masih adanya ego sektoral antar instansi dalam pelaksanaan dilapangan, hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang kurang maksimal



Terwujudnya sinergitas Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil dalam mencegah konflik sosial menjelang pemilu serentak 2024 di wilayah DKI Jakarta yang optimal

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), adalah instrumen politik paling sahih dalam Negara demokrasi. Pilkada bahkan dinilai sebagai manifestasi kedaulatan masyarakat dalam rangka melakukan rekrutmen kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Gagasan Pilkada sebenarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang berlangsung di dunia, khususnya di Indonesia, sekaligus sebagai upaya lain untuk menghindari adanya praktik demokrasi semu (*pseudo democracy*) yang dapat memberangus demokrasi itu sendiri. Pilkada juga dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak individu agar terdapat peluang yang lebih terbuka dan partisipatif dalam menentukan pemimpin sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Artinya, Pilkada merupakan upaya dalam memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai proses politik.

Kontestasi lima tahunan untuk mencari calon pemimpin ideal, kerap masih terantuk kerikil dan batu. Berbagai pelanggaran dalam masa Pemilu maupun Pilkada, masih terus menjadi warna yang lengket. Tak terkecuali di DKI Jakarta yang bersiap menggelar Pilkada 2024 dan kini sudah mulai terlihat memanas suhunya. Meningkatnya pragmatisme dalam Pilkada pun ditunjukkan dengan rasionalitas ekonomi yang menguat. Salah satu kekhawatiran dalam Pilkada serentak 2024 adalah semakin maraknya politik uang, ujaran kebencian (*hate speech*), berita hoax, kampanye berdasarkan SARA dan lain-lain.

Bagaimana tidak, hampir setiap perhelatan demokrasi elektoral yang melibatkan massa selalu ditemukan praktik politik uang. Pada Pilkada 2024 yang lalu hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami polarisasi massa amat kuat. Aktor politik secara langsung/tak langsung menggunakan kampanye jahat, pembohongan (*hoax*), berita palsu (*fake news*), dan politisasi identitas. Media sosial dan aplikasi percakapan memfasilitasi dan menjadi pemicu berkembangnya kampanye jahat, hoax,

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

dan politisasi identitas. Pengguna media sosial dan aplikasi percakapan larut dalam emosi sebagai lovers atau haters terhadap politisi yang mengejar/mempertahankan kekuasaan. Facebook, Twitter, Whatsapp, LINE, dan BBM memediasi begitu cepat dan berefek domino merusak nalar dan percakapan banyak warganet.

Korupsi politik pun dipraktikan dengan berbagai bentuk. Ada jual/beli tiket pencalonan di pemilu dan pemilu (*candidacy buying*) yang dijadikan mekanisme pembiayaan kerja elite dan organisasi partai politik. Lalu ada *vote buying* dan menyuap penyelenggara atau hakim pemilu. Semua merupakan virus demokrasi yang masih dianggap ampuh memenangkan kompetisi pemilu. Pada prakteknya, dan berdasarkan pengalaman pada pilkada sebelumnya, pelaksanaan Pilkada cenderung menimbulkan potensi kerawanan terjadinya gejolak sosial dan tindakan anarkisme yang mengarah pada potensi konflik sosial, komunal dan konflik lebih besar yang dapat mengganggu ketertiban publik secara eskalatif dan menjadi ancaman sosial yang mengarah pada terciptanya instabilitas keamanan di daerah.

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan hidup bermasyarakat di daerah, sehingga menuntut aplikasi peran, fungsi dan tugas Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) TNI AD tingkat Babinsa, Koramil dan Kodim dalam melaksanakan pembinaan teritorial atau pembinaan wilayah khususnya pembinaan upaya mencegah timbulnya potensi kerawanan konflik sosial dari ekses penyelenggaraan Pilkada Serentak.

Agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung dengan sukses, tentu harus dibarengi dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. Disinilah peran penting Aparat Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) sebagai pengembangan fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai penjaga kedaulatan NKRI dan pelayan masyarakat, untuk bertanggung jawab dalam mengawal

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan damai dan tertib. Untuk menjawab potensi permasalahan yang muncul di Pilkada serentak, maka TNI mempunyai peran yang cukup vital sesuai dengan UU TNI berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10.

TNI AD sebagai salah satu komponen utama pertahanan berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 disebutkan bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah membantu Polri untuk tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga, peran TNI melalui aparat Satkowil menjadi penting dalam pengamanan pilkada serentak 2020, khususnya di wilayah Kodim 0818/Malang-Batu sebagai bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan, untuk mengawal keberlangsungan pembangunan nasional.

Sejak tahun 2005-2019 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh (Arifulloh, 2015) (Ramadlan & Masykuri, 2018). Sebagai mekanisme demokrasi yang didesign untuk meminimalisir konflik di masyarakat serta mencegah konflik dalam pemilihan kepimpinan, sehingga tidak terjadi konflik sosial dan kekerasan. (Siswanto, 2017). Pilkada di Indonesia memiliki logika dasar bekerja dalam demokrasi elektoral yaitu; pertama, pemilu dibangun atas basis pondasi preferensi individu *one man, one vote, one voice* yang didasarkan atas basis sosial (*socially bounded Individu*). Kedua, logika “*winner take all*”, siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan segalanya”, sementara bagi yang kalah harus menunggu lima tahun lagi. Kondisi ini menciptakan “gerbong” birokrasi atas dasar basis sosial dilingkup pemerintahan daerah. Logika winner take all, menjelaskan tentang adanya dominasi elit. Dalam konteks inilah peran elit sangat dibutuhkan untuk aktif dalam melakukan pencegahan konflik sosial Pilkada. Konflik yang terjadi sering berujung pada kekerasan dan konflik horizontal (Humaedi, Kudus, Pancasilawan, & Nulhaqim, 2018). Konflik dimulai dari hubungan yang rusak didalam keluarga, tetangga, bermusuhan berdasarkan ras, suku dan agama

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

(Kharisma, 2017).

Konflik menurut Coser terjadi di antara kelompok dalam masyarakat dapat mempengaruhi hubungan kebiasaan serta melemahkan kreativitas. Benturan nilai dan kepentingan, memunculkan ketegangan antara kelompok antara kepentingan pribadi dan kelompok baru yang menuntut adanya kekuasaan, kekayaan dan status mereka (Coser, 1957). Bagi Kriesberg, konflik sosial memiliki landasan obyektif, yaitu mengejar tujuan yang berlawanan. Lawan mengejar tujuan mereka dengan menghitung biaya dan manfaat dari berbagai strategi. Penilaian mereka dipengaruhi oleh ketakutan, kebencian, stereotip, dan informasi yang salah. Jalannya dan hasil dari konflik lebih ditentukan oleh interaksi lawan yang bertentangan daripada oleh karakteristik internal mereka. Kerangka Kriesberg dibangun berdasarkan pada kasus persuasif dengan menempatkan posisi lawan dan tingkat organisasinya sebagai variabel penting (Univer-, 2014). Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat mengalami kerentanan akibat konflik. Untuk itu kajian yang terkait dengan Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik menjadi penting.

Sinergitas Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil dalam mencegah konflik sosial menjelang pemilu serentak 2024 di wilayah DKI Jakarta

Indonesia akan menjalani babak baru praktik demokrasi dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Dalam sistem presidensial sebagaimana yang dianut dalam sistem pemerintahan kita, penting kiranya kita menerapkan konsep demokrasi yang pas sesuai dengan karakteristik bangsa. Pemilu merupakan kunci dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dimana setiap orang diberikan hak untuk menentukan pilihannya secara rasional dan emosional. Didalamnya terdapat wujud partisipasi politik masyarakat dalam sebuah negara, partisipasi politik tersebut sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Setiap warga dan kelompok masyarakat dalam proses demokrasi memperoleh ruang untuk turut berpartisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaannya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksaan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin sebuah pemerintahan. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia tentu saja perlu memastikan terlaksananya pemilu sebagai cerminan profesionalitas dan kredibilitas sebuah negara demokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara Undang-Undang. Menyambut pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 merupakan faktor penting dalam keberhasilan demokrasi itu sendiri. Menciptakan keberhasilan pemilu tidak luput dari penerapan asas pemilu sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia yaitu Luber-Jurdil (Akronim dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Asas Bebas memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu juga mengikuti Asas Rahasia, di mana pemilih yang memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin. Sedangkan asas Jujur mengharapkan bahwa setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir, Asas Adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta Pemilu akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, kajian mengenai pemilu dan evaluasi pemilu dalam menghasilkan pemerintahan yang stabil dan demokratis menjadi fokus utama tidak hanya dari kalangan akademisi, tetapi juga melingkupi praktisi dan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

kalangan penggiat demokrasi secara luas. Banyak sisi yang menjadi objek pembahasan dari pemilu, salah satunya dimensi politik identitas yang menimbulkan polarisasi terhadap pemilu itu sendiri. Politik Identitas dan polarisasi tentu bukan hal yang positif, bahkan kedua hal tersebut dapat memicu gejolak di masyarakat sehingga mengganggu keamanan. Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independent dan telah memenuhi persyaratan.

Sejumlah peristiwa mengejutkan yang terjadi jelang pencalonan kepala daerah, misalnya, membuktikan itu. Belum lagi energi yang harus dikeluarkan selama proses pilkada serentak yang amat melelahkan. Tercatat, gesekan- gesekan antar pendukung pasangan calon dan partai politik sudah mulai terasa. Selain itu, peningkatan penyebaran informasi hoax yang bisa memicu keributan di masyarakat. Hoax disebar karena ada aktor ingin memanfaatkan situasi yang berkembang. Dan polarisasi yang terbentuk selama ini menyebabkan identitas primordial, kesukuan, agama, dan kesenjangan sosial dapat dimanfaatkan menimbulkan anarkisme massa. Oleh karena itu, aparat keamanan yaitu khususnya TNI AD dalam hal ini aparat Satkowil dituntut supaya bisa mengelola perbedaan yang ada di tengah masyarakat dengan baik, sehingga tidak menjadi sumber konflik.

Keterlibatan dan Peran Kodam Jaya dan Kodim 0501/Jakarta Pusat dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mengamankan Pilkada di DKI Jakarta Tahun 2024 dalam rangka mengawal keberlangsungan pembangunan nasional adalah sebagai bentuk keterpanggilan dan kepedulian untuk ikut serta menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sesuai Undang-Undang yang berlaku, bahwa penempatan peran TNI dalam penanganan konflik sosial dan pengamanan pemilu adalah pada posisi membantu instansi lain sesuai permintaan.

KESIMPULAN

1. Dimensi Komunikasi. Dalam kesimpulannya berdasarkan hasil Observasi lapangan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Kesbangpol DKI Jakarta, Ketua KPUD DKI Jakarta, Kasdam Jaya/Jayakarta, dan Kasdim 0501/Jakarta Pusat DKI Jakarta, dimensi komunikasi yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sinergitas antara Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil dalam mencegah konflik sosial. Dengan berkomunikasi secara baik, kedua pihak dapat bekerja sama dengan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, penting bagi Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil untuk terus meningkatkan komunikasi yang efektif guna mencegah konflik sosial dan menciptakan kedamaian menjelang pemilu serentak 2024 di wilayah DKI Jakarta.

2. Dimensi Koordinasi. Berdasarkan hasil Observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Kesbangpol DKI Jakarta, Ketua KPUD DKI Jakarta, Kasdam Jaya/Jayakarta, dan Kasdim 0501/Jakarta Pusat DKI Jakarta, memberikan gambaran jelas mengenai penerapan dimensi koordinasi dalam sinergitas untuk mencegah konflik sosial selama Pilkada DKI Jakarta 2024. Rapat koordinasi rutin yang dihadiri oleh baik dari Perwakilan Pemda, KPUD maupun Satkowil di wilayah DKI Jakarta menjadi bukti nyata adanya hubungan langsung dan kesempatan awal bagi setiap instansi untuk berkoordinasi. Forum ini tidak hanya menjadi wadah untuk bertukar informasi, tetapi juga untuk merumuskan strategi bersama, mengidentifikasi potensi kerawanan, dan merencanakan aksi pencegahan yang terpadu.
3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dapat membantu membangun sinergitas antara Pemprov DKI Jakarta, Satkowil, dan masyarakat. Koordinasi melibatkan pengaturan tugas dan tanggung jawab serta pemantauan pelaksanaan kegiatan. Sementara komunikasi melibatkan pertukaran informasi dan pemahaman yang jelas antara semua pihak terkait. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam membangun sinergitas, antara lain adalah perbedaan pandangan,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

ego masing-masing pihak, kurangnya kepercayaan, dan kurangnya komitmen. Untuk mengatasi hambatan ini, Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil perlu melakukan beberapa upaya, seperti:

- Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil perlu meningkatkan komunikasi secara terbuka dan jujur. Hal ini dapat membantu mengurangi perbedaan pandangan dan membangun kepercayaan di antara semua pihak.
- Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil perlu saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam upaya mencegah konflik sosial. Dengan bekerja sama, mereka dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.
- Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil perlu membangun kepercayaan di antara semua pihak dengan memberikan contoh kepemimpinan yang baik dan konsisten. Kepercayaan adalah kunci utama dalam membangun sinergitas.
- Pemprov DKI Jakarta dan Satkowil perlu menunjukkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan transparansi, semua pihak dapat merasa lebih yakin dan terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, L., Murod, M., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., & Andiani, D. 2021. Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39–64.
- Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma, Teori-Tujuan- Strategi dan politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ayu, Maya. 2017. Pilkada DKI: politicawave, Ahok Djarot Unggul di Medaia Sosial. Dapat diakses di: www.pilkada.tempo.co/amp/866368/pilkada-dki-politica-wave-ahok-djarot-unggul-di-media-sosial
- Bawaslu RI. 2017. Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, 1, 82.
- Emily R. Lai. 2011. Collaborations: A Literature Review, Pearson.
- Gabrilin, Abba. 2017. Indeks Demokrasi di DKI Jakarta Alami Penurunan, ini Penyebabnya. Dapatdiaksesdi:<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/122409>

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

- 01/indeks-demokrasi-di-dki-jakarta-alami-penurunan-ini-penyebabnya
- Gordon, Davis. 1999. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I Pengantar. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Haris, Peter dan Ben reily. 2000. Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator. Depok: Ameepro
- KPU Provinsi DKI Jakarta. 2018. Data dan Infografik Pilkada Jakarta 2017 Kriyanto, R. 2007. Teknik Praktik Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana..
- Kriyantono,R.2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi Edisi Pertama. Jakarta: PT Fajar Interpratama.
- Mansyah, B. (2017). Fenomena Berita Hoax Media Sosial (Facebook) Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- MoU Polri dengan TNI Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 Tentang Perbaikan TNI Kepada Polri Dalam Kamtibmas
- Nasution, M. A. 2017. Hoaks Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam.
- Yurisprudentia. Nugroho, A.S. 2017. Tips Menghadapi Hoax dan Spam www.ilmukomputer.com.
- Okamoto, Masaaki and Honna Jun. 2014. Introduction: Local Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, 3-6.
- Ramadlan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. Jurnal Penelitian Politik, 15(2), 249. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.753>
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer. Jakarta: Prenada Media
- Thung Ju Lan et. al. 2011. Panduan Implementasi Kebijakan tentang Kerangka Kerja Pencegahan Konflik. Jakarta. Penerbit Penelitian Politik LIPI
- Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial